

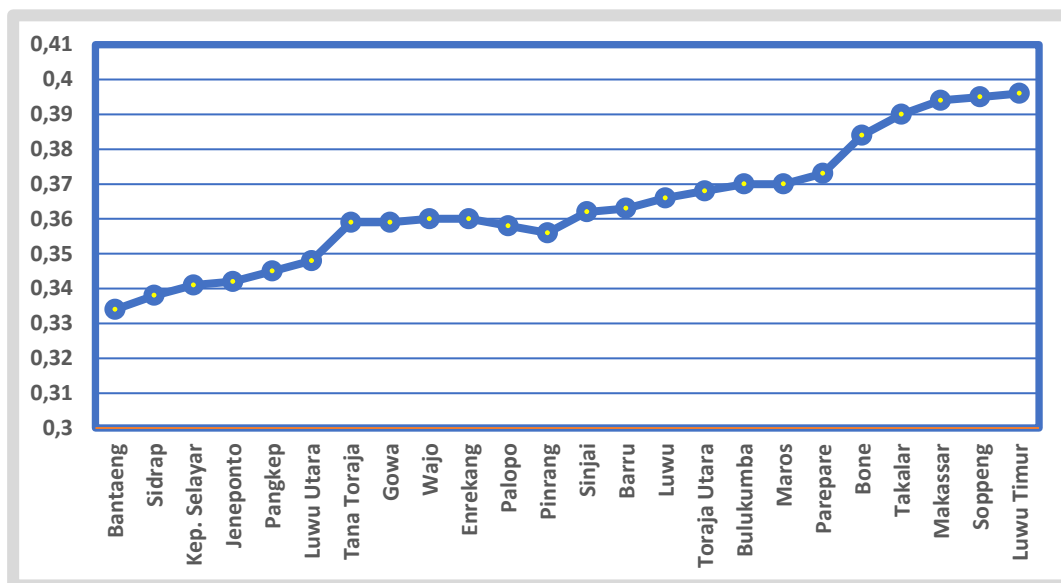
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan selalu menjadi perhatian utama di tingkat global. Hampir semua negara, baik maju maupun berkembang, menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Namun, pengalaman historis menunjukkan bahwa pertumbuhan semata tidak cukup tanpa diiringi oleh perubahan dalam struktur perekonomian dan pemerataan hasil pembangunan. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu persoalan yang paling menantang dalam proses pembangunan ekonomi modern.

Teori Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun ketika perekonomian semakin maju dan pemerataan terjadi secara bertahap (Kuznets, S., 1955). Namun, kenyataan di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Di banyak wilayah, ketimpangan justru cenderung menetap bahkan meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Kondisi tersebut juga tampak di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, nilai Gini Ratio selama periode 2019–2023 relatif stagnan di kisaran 0,387–0,390, menandakan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya menciptakan pemerataan pendapatan antarwilayah dan antarkelompok Masyarakat (BPS , 2023)



Gambar 1. 1 Rata – Rata Gini Ratio Sulawesi Selatan 2019-2023

Garis pada gambar grafik di atas menunjukkan tingkat ketimpangan antarwilayah di Sulawesi Selatan yang masih cukup nyata. Wilayah dengan dominasi sektor industri dan jasa seperti Makassar dan Luwu Timur memiliki ketimpangan pendapatan lebih tinggi dibandingkan daerah berbasis pertanian seperti Bantaeng dan Sidrap. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif.

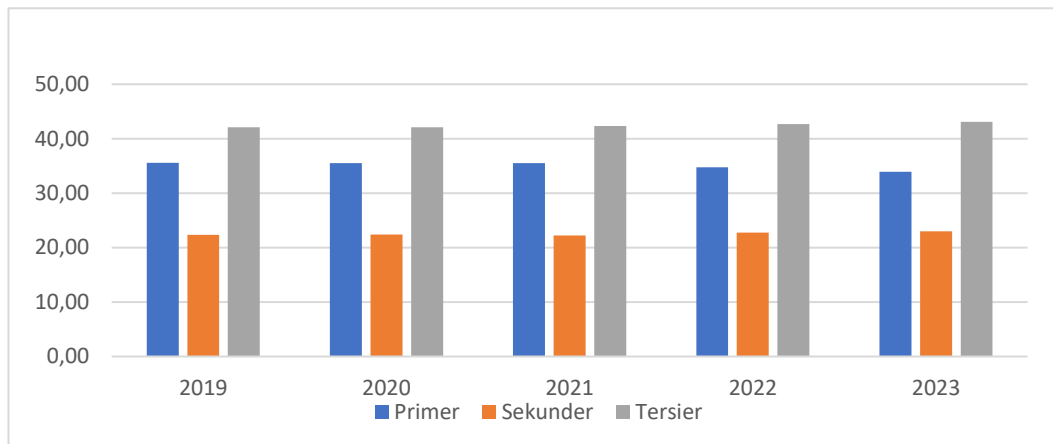
Stagnasi nilai Gini Ratio tersebut memperkuat temuan penelitian terdahulu. Yusuf, Anglingkusumo, dan Sumner (2021) menemukan bahwa transformasi pada periode tertentu di Indonesia mampu menurunkan ketimpangan sementara sebaliknya bahwa transformasi struktural justru memperlebar kesenjangan desa kota karena pertumbuhan sektor modern lebih terkonsentrasi di wilayah. Dengan demikian, fenomena di Sulawesi Selatan mengindikasikan adanya paradoks: transformasi sektoral memang terjadi, tetapi belum menghasilkan pembangunan yang inklusif.

Salah satu faktor penting yang menjelaskan fenomena ini adalah transformasi struktural. Negara-negara maju pada umumnya berhasil mencapai

pembangunan berkelanjutan melalui proses panjang pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa yang lebih modern. Perubahan struktur ekonomi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat.

Dalam teori pembangunan strukturalis, menekankan bahwa pembangunan ekonomi modern selalu ditandai oleh pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan) ke sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) serta sektor tersier (perdagangan, transportasi, dan jasa) (Chenery, H. B., 1979). Teori Lewis (1954) juga menjelaskan bahwa proses transformasi hanya akan berhasil apabila terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional berproduktifitas rendah ke sektor modern yang lebih efisien. Sementara Kuznets (1973) menambahkan bahwa transformasi yang tidak merata dapat memperlebar ketimpangan.

Fenomena transformasi tersebut terlihat di Sulawesi Selatan selama periode 2019–2023., di mana struktur ekonomi daerah mulai mengalami pergeseran yang cukup signifikan selama 2019–2023. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, kontribusi sektor primer secara bertahap menurun, sementara sektor sekunder dan tersier menunjukkan tren peningkatan. Pergeseran ini menggambarkan peralihan kegiatan ekonomi dari basis pertanian menuju sektor industri dan jasa modern. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Sulawesi Selatan telah memasuki tahap menengah transformasi struktural, meskipun laju pergeserannya berbeda antarwilayah dan belum sepenuhnya merata.



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, (2025 diolah)

Gambar 1. 2 Pergeseran Kontribusi Sektor PDRB Sulawesi Selatan 2019–2023

Gambar Grafik di atas memperlihatkan tren penurunan kontribusi sektor primer dan peningkatan sektor sekunder serta tersier selama lima tahun terakhir. Pola ini menjadi indikasi awal bahwa struktur ekonomi Sulawesi Selatan bergerak ke arah yang lebih modern, dengan pergeseran pusat kegiatan ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa.

Perubahan struktur ekonomi tersebut menunjukkan arah positif menuju modernisasi, tetapi belum sepenuhnya menciptakan pembangunan yang inklusif. Sebagaimana dikemukakan oleh bahwa transformasi di negara berkembang sering terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan sektor padat keterampilan, sementara angkatan kerja di pedesaan sulit terserap dalam sektor modern (Rodrik, 2016). Kondisi ini juga terjadi di Sulawesi Selatan, di mana sektor jasa dan perdagangan tumbuh pesat, tetapi belum diikuti dengan peningkatan signifikan pada serapan angkatan kerja non-pertanian.

Selain struktur ekonomi, investasi (PMDN) juga menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi struktural. Investasi berperan sebagai motor penggerak modernisasi sektor produktif, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis ekonomi daerah. Timmer dan de Vries (2009) menunjukkan

bahwa peningkatan investasi dapat mempercepat pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, sementara Kuncoro (2012) menegaskan bahwa ketimpangan distribusi investasi antarwilayah dapat memperlebar disparitas pembangunan.

Di Sulawesi Selatan, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat cukup signifikan selama 2019–2023, menandakan meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi daerah. Namun, konsentrasi investasi yang masih terfokus di kota besar seperti Makassar menunjukkan bahwa penyebarannya belum merata ke wilayah perdesaan, sehingga manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya dirasakan oleh semua kabupaten/kota.

Selain investasi, jumlah penduduk juga memegang peranan strategis dalam proses pembangunan dan transformasi struktural. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi kekuatan pendorong ekonomi karena memperluas pasar dan memperbesar potensi tenaga kerja. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan penduduk justru memperbesar beban pembangunan dan ketimpangan. Bloom dan Williamson (1998) menjelaskan bahwa dividen demografis dapat menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Asia (Bloom, D. E. , & Williamson, J. G., 1998),

Sementara Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memperparah kesenjangan ekonomi. Di Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan jumlah penduduk produktif perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja agar potensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah angkatan kerja. Keberhasilan transformasi struktural sangat bergantung pada kemampuan dan ketersediaan angkatan kerja dalam merespons perubahan kebutuhan sektor modern. Angkatan kerja yang produktif, terampil, dan adaptif menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan industri dan jasa yang berdaya saing tinggi. Namun,

Rodrik (2016), menyatakan bahwa di banyak negara berkembang, pertumbuhan angkatan kerja sering kali tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas dan kesempatan kerja di sektor modern. Hal ini juga tampak di Sulawesi Selatan, di mana peningkatan aktivitas ekonomi modern belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas angkatan kerja, yang sebagian besar masih terkonsentrasi di sektor informal dan berpendidikan menengah ke bawah.

Di Sulawesi Selatan, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat cukup signifikan selama 2019–2023, menandakan meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi daerah. Namun, konsentrasi investasi yang masih terfokus di kota besar seperti Makassar menunjukkan bahwa penyebarannya belum merata ke wilayah perdesaan, sehingga manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya dirasakan oleh semua kabupaten/kota.

Selain investasi, jumlah penduduk juga memegang peranan strategis dalam proses pembangunan dan transformasi struktural. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi kekuatan pendorong ekonomi karena memperluas pasar dan memperbesar potensi tenaga kerja. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan penduduk justru memperbesar beban pembangunan dan ketimpangan. Bloom dan Williamson (1998) menjelaskan bahwa dividen demografis dapat menjadi

peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Asia (Bloom, D. E. , & Williamson, J. G., 1998),

Sementara Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memperparah kesenjangan ekonomi (Todaro, M. P. , & Smith, S. C, 2015). Di Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan jumlah penduduk produktif perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja agar potensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah angkatan kerja. Keberhasilan transformasi struktural sangat bergantung pada kemampuan dan ketersediaan angkatan kerja dalam merespons perubahan kebutuhan sektor modern. Angkatan kerja yang produktif, terampil, dan adaptif menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan industri dan jasa yang berdaya saing tinggi. Namun,

Rodrik (2016), menyatakan bahwa di banyak negara berkembang, pertumbuhan angkatan kerja sering kali tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas dan kesempatan kerja di sektor modern (Rodrik, 2016). Hal ini juga tampak di Sulawesi Selatan, di mana peningkatan aktivitas ekonomi modern belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas **angkatan kerja**, yang sebagian besar masih terkonsentrasi di sektor informal dan berpendidikan menengah ke bawah.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mewujudkan transformasi struktural yang inklusif. Di satu sisi, sektor modern menunjukkan perkembangan dan investasi mengalami peningkatan, namun di sisi lain, penyerapan angkatan kerja belum optimal, persebaran investasi masih

cenderung timpang, dan ketimpangan pendapatan relatif stabil. Dengan demikian, terdapat indikasi kesenjangan antara teori dan realitas empiris yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Secara teoritis, transformasi struktural seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi bukti empiris di tingkat daerah masih perlu diuji untuk mengetahui sejauh mana proses tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan.

Kondisi pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan sebelumnya memiliki implikasi penting bagi arah kebijakan pembangunan regional. Pergeseran struktur ekonomi yang ditandai oleh menurunnya peran sektor primer dan meningkatnya kontribusi sektor sekunder serta tersier menunjukkan bahwa proses transformasi struktural telah berlangsung, namun belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan. Ketimpangan pendapatan yang relatif stagnan, penyerapan angkatan kerja yang belum optimal, serta konsentrasi investasi di wilayah tertentu mengindikasikan bahwa manfaat transformasi struktural masih bersifat terbatas secara spasial dan sektoral.

Apabila kondisi ini terus berlanjut, transformasi struktural berpotensi memperkuat ketimpangan antarwilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan regional di Sulawesi Selatan memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada percepatan pertumbuhan sektor modern, tetapi juga pada pemerataan distribusi investasi ke wilayah non-perkotaan, penguatan keterkaitan sektor primer dengan sektor industri pengolahan, serta peningkatan kualitas angkatan kerja agar proses transformasi struktural dapat berlangsung secara lebih inklusif dan berkontribusi nyata terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mewujudkan transformasi struktural yang inklusif. Di satu sisi, perkembangan sektor modern dan peningkatan investasi menunjukkan arah yang positif, namun di sisi lain, penyerapan tenaga kerja belum optimal dan ketimpangan pendapatan masih relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan empiris antara teori pembangunan strukturalis dan realitas ekonomi daerah, di mana proses transformasi belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan pendapatan.

Transformasi struktural diyakini sebagai mekanisme penting dalam meningkatkan produktivitas dan pemerataan ekonomi melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Namun, keberhasilan proses tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dasar seperti investasi (PMDN) yang mendorong modernisasi sektor produktif, jumlah penduduk yang menentukan besarnya potensi pasar dan tenaga kerja, serta angkatan kerja yang menjadi penggerak utama dalam perubahan struktur ekonomi. Ketiga faktor ini diduga memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan indeks transformasi struktural, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) antarwilayah di Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, penelitian ini secara kuantitatif bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh investasi, jumlah penduduk, dan angkatan kerja terhadap transformasi struktural, serta menganalisis pengaruh transformasi struktural terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh variabel diukur menggunakan data panel kabupaten/kota periode 2019–2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan bukti empiris mengenai hubungan antarvariabel ekonomi tersebut serta memperkaya literatur tentang dinamika transformasi struktural dan ketimpangan pendapatan di tingkat regional Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah investasi, populasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap transformasi struktural di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1.2.2 Apakah transformasi struktural berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk menganalisis pengaruh investasi, populasi, dan tenaga kerja terhadap transformasi struktural di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1.3.2 Untuk menganalisis pengaruh transformasi structural terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan manfaat dari penelitian ini yaitu.

1.4.1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan transformasi struktural dan ketimpangan pendapatan.
- b. Menjadi referensi empiris tentang pengaruh faktor-faktor ekonomi seperti investasi, populasi, dan tenaga kerja terhadap transformasi struktural di level provinsi.

- c. Menambah literatur akademik mengenai hubungan antara transformasi struktural dan ketimpangan pendapatan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik ekonomi agraris-jasa.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan Pembangunan ekonomi yang lebih berfokus pada peningkatan kualitas transformasi struktural.
- b. Memberikan Gambaran bagi pembuat kebijakan mengenai peran investasi, populasi, dan tenaga kerja dalam mempercepat pergeseran struktur ekonomi yang lebih inklusif.
- c. Memberikan informasi bagi pelaku usaha, investor, dan Masyarakat tentang potensi dan tantangan Pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan, terutama dalam kaitannya dengan Upaya mengurangi ketimpangan pendapatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat tidak merata, sehingga sebagian kelompok memperoleh pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat tidak merata sehingga sebagian kelompok memperoleh pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Dalam penelitian ekonomi, ketimpangan pendapatan umumnya diukur menggunakan Gini Ratio, yang menunjukkan seberapa besar penyimpangan distribusi pendapatan aktual dari distribusi pendapatan yang dianggap merata. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1, di mana angka yang lebih tinggi menandakan ketimpangan yang semakin besar. Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan tingkat ketimpangan ke dalam tiga kategori, yaitu ketimpangan rendah (0,00–0,349), ketimpangan sedang (0,350–0,449), dan ketimpangan tinggi ($\geq 0,450$). Klasifikasi ini digunakan secara nasional sebagai dasar untuk memotret kondisi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.

Dalam kajian teoritis, terdapat beberapa pendekatan yang menjelaskan mengapa ketimpangan pendapatan dapat timbul dan bertahan dalam proses pembangunan. Teori Kurva U Terbalik Kuznets (1955) yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan meningkat akibat munculnya sektor modern yang hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja berpendapatan tinggi. Sementara itu, mayoritas masyarakat masih berada pada sektor tradisional dengan produktivitas rendah. Namun, ketika perekonomian memasuki

tahap yang lebih matang, kesempatan kerja semakin meluas ke berbagai kelompok masyarakat sehingga ketimpangan mulai menurun. Teori ini menjadi dasar penting dalam menjelaskan dinamika ketimpangan selama proses transformasi ekonomi di negara berkembang.

Teori Dualisme Lewis (1954) yang menjelaskan bahwa ketimpangan muncul akibat perbedaan produktivitas antara sektor tradisional dan sektor modern. Sektor modern memberikan pendapatan yang jauh lebih tinggi, sementara sektor tradisional cenderung padat tenaga kerja dengan produktivitas rendah. Ketimpangan akan semakin besar apabila perpindahan tenaga kerja ke sektor modern berlangsung lambat atau tidak merata.

Teori Chenery dan Syrquin (1979) yang menekankan bahwa ketimpangan dapat timbul ketika pergeseran struktur ekonomi tidak berjalan seimbang. Jika pertumbuhan sektor modern lebih cepat dibandingkan sektor tradisional, sementara penyerapan tenaga kerja tidak merata antarwilayah, maka ketimpangan akan meningkat. Dalam kerangka ini, struktur ekonomi yang semakin bertumpu pada sektor sekunder dan tersier berpotensi meningkatkan kesenjangan apabila wilayah tertentu lebih cepat beradaptasi daripada wilayah lainnya.

Penelitian terdahulu juga memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai hubungan antara transformasi ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Penelitian Baymul & Sen (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan cenderung meningkat di negara berkembang ketika pertumbuhan sektoral lebih banyak bertumpu pada sektor jasa modern yang padat modal, karena sektor ini hanya menyerap tenaga kerja terampil. Sebaliknya, pergeseran ke sektor manufaktur yang lebih padat karya terbukti mampu menurunkan ketimpangan melalui penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas.

Temuan ini diperkuat oleh studi Ngwakwe & Kamara (2024) yang menganalisis ketimpangan pada negara-negara berkembang di Afrika Sub-Sahara. Penelitian tersebut menemukan bahwa transformasi struktural yang tidak inklusif, terutama ketika pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor non-tradisional di wilayah perkotaan, dapat memperlebar jurang pendapatan antara kelompok masyarakat perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut disebabkan perbedaan akses terhadap pekerjaan produktif, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Berdasarkan teori dan temuan empiris tersebut, ketimpangan pendapatan dapat dipahami sebagai fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan arah pembangunan, pergeseran struktur sektor, dan sejauh mana kesempatan ekonomi dapat diakses secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap pola ketimpangan pendapatan sangat penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2.1.2 Transformasi Struktural

Transformasi struktural merupakan proses perubahan mendasar dalam perekonomian yang ditandai oleh pergeseran kontribusi sektoral dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Pada tahap awal pembangunan, aktivitas ekonomi cenderung bertumpu pada sektor pertanian dan ekstraktif yang memiliki produktivitas relatif rendah. Seiring modernisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat, kontribusi sektor industri dan jasa mulai meningkat. Pergeseran ini mencerminkan proses pematangan struktur ekonomi, di mana perekonomian bergerak dari orientasi agraris menuju ekonomi berbasis industri dan jasa yang lebih produktif.

Lewis (1954) menjelaskan transformasi struktural melalui model dualisme ekonomi yang membagi perekonomian menjadi sektor tradisional berproduktivitas rendah dan sektor modern berproduktivitas tinggi. Perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional menuju sektor modern terjadi karena akumulasi modal, peningkatan produktivitas, serta ekspansi industri. Dalam kerangka ini, transformasi struktural tidak hanya sekadar perpindahan sumber daya antar sektor, tetapi juga mencerminkan berkembangnya sektor modern sebagai sumber utama penciptaan nilai tambah.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Chenery dan Syrquin (1979) yang mengidentifikasi pola umum pembangunan lintas negara. Seiring meningkatnya pendapatan per kapita, kontribusi sektor primer akan menurun, sementara sektor industri pengolahan dan jasa tumbuh pesat akibat perubahan permintaan, diversifikasi ekonomi, urbanisasi, dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, perubahan struktur ekonomi dipandang sebagai indikator penting keberhasilan pembangunan jangka panjang, di mana perekonomian semakin bergerak ke arah struktur yang lebih kompleks, modern, dan efisien.

Sementara itu, Kuznets (1955) menambahkan dimensi distribusi pendapatan dalam proses transformasi struktural. Melalui model kurva-U terbalik, ia menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal transformasi karena sektor modern berkembang lebih cepat dibandingkan sektor tradisional. Namun ketika modernisasi semakin merata, ketimpangan dapat menurun. Ini menunjukkan bahwa transformasi struktural tidak hanya berdampak pada perubahan komposisi sektoral, tetapi juga berimplikasi terhadap dinamika pemerataan Pembangunan.

Sejalan dengan teori tersebut, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa efektivitas transformasi struktural bergantung pada arah dan kualitas

pergeseran sektoral. McMillan dan Rodrik (2014) menunjukkan bahwa pergeseran tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor berproduktivitas tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara Asia. Namun di beberapa negara lain, transformasi tidak menghasilkan pertumbuhan optimal karena pergeseran justru terjadi pada sektor-sektor dengan produktivitas rendah.

Di Indonesia, pola transformasi struktural juga menunjukkan dinamika yang beragam. Kajian Bank Dunia oleh Sander dan Yoong (2020) menilai bahwa produktivitas meningkat terutama dalam sektor-sektor tertentu, namun pergeseran struktural antarsektor belum sepenuhnya kuat. Kim, Sumner, dan Yusuf (2018) menemukan bahwa pertumbuhan pada sebagian subsektor modern masih rendah sehingga kontribusinya terhadap transformasi ekonomi nasional belum optimal. Penelitian lain oleh Romli et al. (2016) dan Dewi Sinta (2022) menunjukkan bahwa transformasi sektoral di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, investasi, dan dinamika sektoral. Putri dan Monika (2023) menegaskan bahwa arah transformasi sektoral yang lebih cepat pada sektor jasa modern dapat memperlebar ketimpangan antardaerah apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas di sektor lain.

Secara keseluruhan, literatur teori dan empiris menunjukkan bahwa transformasi struktural merupakan proses kompleks yang melibatkan pergeseran kontribusi sektoral, perubahan pola konsumsi, urbanisasi, akumulasi modal, dan peningkatan produktivitas. Keberhasilan transformasi struktural ditandai oleh penguatan sektor industri dan jasa modern yang mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi, sehingga membawa perekonomian menuju struktur yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

2.1.3 Investasi

Investasi merupakan salah satu pendorong utama dalam pembangunan ekonomi karena berperan meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan barang modal, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Sukirno (2004) menjelaskan bahwa investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang memungkinkan peningkatan kemampuan produksi di masa mendatang. Dalam perspektif pembangunan, Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa pembentukan modal sangat penting dalam meningkatkan produktivitas, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan transformasi struktural, investasi menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Melalui teori transformasi struktural Lewis (1954), investasi dipandang sebagai motor penggerak perkembangan sektor modern. Lewis menekankan bahwa ketika investasi meningkat, sektor modern dapat memperluas kegiatan ekonomi, menyerap tenaga kerja dari sektor tradisional, dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, investasi tidak hanya menambah kapasitas produksi, tetapi juga mengubah struktur ekonomi melalui mekanisme perpindahan tenaga kerja.

Pandangan ini sejalan dengan pola transformasi yang dijelaskan oleh Chenery dan Syrquin 1975, yang menunjukkan bahwa kenaikan investasi berperan dalam mendorong industrialisasi dan diversifikasi struktur ekonomi. Perekonomian yang sedang berkembang memerlukan tingkat investasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan peran sektor industri dan jasa, sehingga porsi

sektor primer secara bertahap menurun. Dengan adanya investasi, modernisasi teknologi dan peningkatan efisiensi produksi dapat terjadi, memungkinkan terjadinya perubahan struktural yang lebih cepat (Chenery, H. B. , & Syrquin, M., 1975).

Teori modern yang dikemukakan Gollin (2023) memperkuat hubungan antara investasi dan transformasi struktural. Gollin menegaskan bahwa investasi memungkinkan terjadinya peningkatan produktivitas yang bersifat permanen, terutama melalui modernisasi sektor industri dan jasa. Ketika produktivitas sektor modern meningkat, tenaga kerja akan bergerak menuju sektor tersebut, sehingga struktur ekonomi berubah menjadi lebih produktif dan bernilai tambah tinggi.

Berbagai temuan empiris mendukung peran penting investasi dalam mendorong transformasi struktural. Marouani et al. (2023) menunjukkan bahwa investasi domestik merupakan determinan utama percepatan industrialisasi di negara berkembang. Baymul dan Sen (2020) menemukan bahwa peningkatan investasi pada sektor manufaktur mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Di Indonesia, penelitian Dewi Sinta (2022) memperlihatkan bahwa PMDN berpengaruh positif terhadap perubahan struktural di Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hasani (2010), yang menyatakan bahwa investasi domestik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas industri dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa investasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menjadi pendorong utama perubahan struktural melalui modernisasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan penguatan peran sektor industri dan jasa. Dengan demikian, investasi merupakan variabel penting yang menentukan arah transformasi struktural dan perkembangan ekonomi wilayah.

2.1.4 Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik (2024) menjelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, atau mereka yang berada kurang dari enam bulan tetapi bermaksud menetap. Perubahan jumlah dan komposisi penduduk dipengaruhi oleh dinamika demografi seperti kelahiran, kematian, migrasi, pernikahan, dan perpindahan penduduk (Putri, 2011–2019). Jumlah penduduk menjadi indikator penting dalam pembangunan karena memengaruhi skala permintaan, struktur konsumsi, serta arah perkembangan sektor ekonomi.

Menurut Chenery dan Syrquin (1979), pertumbuhan jumlah penduduk memainkan peran ganda dalam transformasi struktural, yaitu sebagai pendorong permintaan dan sebagai faktor penawaran. Dari sisi permintaan, populasi yang besar memperluas pasar domestik sehingga mendorong diversifikasi konsumsi dari barang primer menuju barang industri dan jasa. Pergeseran pola konsumsi ini menjadi pemicu utama peralihan struktur ekonomi. Penelitian Romli et al. (2016) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Madura berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri, menandakan bahwa dinamika demografi berperan langsung dalam mempercepat perubahan struktur sektoral.

Teori Lewis (1954) menjelaskan bahwa jumlah penduduk berkaitan erat dengan kapasitas suatu negara dalam melakukan ekspansi ekonomi modern. Dalam model dualistiknya, Lewis menekankan bahwa populasi yang besar menyediakan cadangan tenaga kerja bagi sektor modern sehingga memungkinkan bertumbuhnya kegiatan ekonomi berproduktivitas tinggi. Meskipun fokus utamanya berada pada mekanisme perpindahan tenaga kerja, pandangan Lewis menggarisbawahi bahwa ukuran populasi menentukan

kemampuan suatu wilayah melakukan modernisasi struktur ekonomi. Temuan Romli et al. (2016) kembali mendukung kerangka ini, di mana populasi menjadi faktor signifikan dalam memengaruhi perubahan nilai tambah sektor industri di daerah penelitian tersebut.

Selanjutnya, Bloom dan Williamson (1998) menyoroti bahwa pertumbuhan penduduk yang diiringi peningkatan proporsi usia produktif menciptakan kondisi bonus demografi. Bonus demografi memberikan peluang percepatan transformasi struktural karena struktur penduduk yang didominasi usia produktif meningkatkan produktivitas agregat dan mendorong modernisasi sektor ekonomi. Penelitian Bloom dan Williamson menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu memanfaatkan komposisi penduduknya mengalami perubahan sektoral yang lebih cepat dan stabil. Pandangan ini relevan dalam transformasi ekonomi di Indonesia yang juga mengalami pertumbuhan penduduk usia produktif yang cukup besar.

Sementara itu, Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk dapat menjadi peluang maupun hambatan tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Populasi besar dapat mendorong pertumbuhan apabila disertai peningkatan pendidikan dan keterampilan, namun dapat menjadi tekanan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Perspektif ini menekankan bahwa perubahan struktur penduduk harus dikelola secara tepat agar mampu mendukung transformasi ekonomi. Penelitian terdahulu di Indonesia menunjukkan fenomena serupa, di mana pertumbuhan penduduk dan urbanisasi cepat dapat menimbulkan tekanan pada sektor tradisional apabila tidak diiringi penciptaan kegiatan ekonomi modern.

Dengan demikian, teori dan temuan empiris tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk tidak hanya menjadi ukuran skala demografis, tetapi

juga faktor strategis yang menentukan arah dan kecepatan transformasi struktural. Pertumbuhan penduduk dapat mempercepat modernisasi ekonomi melalui perluasan permintaan, peluang bonus demografi, dan perubahan struktur konsumsi, namun pada saat yang sama menuntut peningkatan kualitas penduduk agar proses transformasi berjalan optimal.

2.1.5 Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan salah satu komponen utama dalam analisis ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi. Badan Pusat Statistik (2023) mendefinisikan angkatan kerja sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk mengukur indikator penting seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan demikian, angkatan kerja tidak hanya menggambarkan besarnya penduduk usia produktif, tetapi juga tingkat keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi suatu wilayah.

Penelitian Gani dan Yusuf (2022) menegaskan bahwa angkatan kerja mencerminkan penduduk usia produktif yang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk terlibat dalam pasar kerja, baik melalui pekerjaan maupun pencarian kerja. Konsep ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja tidak hanya dipengaruhi oleh status bekerja, tetapi juga oleh faktor sosial ekonomi, preferensi individu, dan dinamika pasar kerja. Dengan demikian, angkatan kerja merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi penawaran tenaga kerja dalam perekonomian.

Angkatan kerja berkaitan dengan Teori Partisipasi Angkatan Kerja, yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu untuk masuk atau tidak masuk ke pasar kerja. Tingkat pendidikan, struktur upah, kondisi

rumah tangga, serta karakteristik demografi seperti usia dan jenis kelamin memengaruhi tingkat partisipasi seseorang dalam angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar peluang seseorang memasuki pasar kerja formal. Selain itu, insentif ekonomi berupa kesempatan kerja di sektor produktif dan tingkat upah yang menarik juga mendorong peningkatan partisipasi tenaga kerja. Teori ini memperlihatkan bahwa angkatan kerja tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Transformasi struktural dalam angkatan kerja memiliki peran yang sangat strategis. Teori dualisme Lewis (1954) menjelaskan bahwa perekonomian pada tahap awal didominasi oleh sektor tradisional yang berproduktivitas rendah dan memiliki surplus tenaga kerja. Transformasi terjadi ketika sektor modern—yang terdiri dari industri dan jasa—mengalami ekspansi sehingga mampu menyerap tenaga kerja dari sektor tradisional. Perpindahan tenaga kerja ini menjadi mekanisme kunci dalam meningkatkan produktivitas agregat, karena sektor modern memiliki teknologi dan kapasitas produksi yang lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional.

Pandangan Lewis diperkuat oleh teori perubahan struktural yang dikemukakan Chenery dan Syrquin (1975), yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara berkembang umumnya diiringi dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Pergeseran ketenagakerjaan ini terjadi seiring meningkatnya pendapatan, diversifikasi produksi, dan berkembangnya permintaan terhadap barang industri dan jasa. Dengan demikian, transformasi struktural tidak dapat terjadi tanpa adanya perubahan komposisi tenaga kerja antar sektor, sehingga angkatan kerja menjadi salah satu pilar utama dalam proses modernisasi ekonomi.

Kinfemichael dan Morshed (2024) menegaskan bahwa transformasi struktural di negara berkembang ditandai oleh pergeseran tenaga kerja menuju sektor modern yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Proses ini meningkatkan efisiensi perekonomian karena perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa memungkinkan peningkatan output menggunakan sumber daya yang sama. Dengan kata lain, perubahan struktur ketenagakerjaan merupakan mekanisme fundamental yang mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas.

Secara keseluruhan, angkatan kerja tidak hanya berfungsi sebagai indikator statistik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang berperan dalam proses transformasi struktural. Teori-teori tersebut menunjukkan bahwa kualitas, kesiapan, serta distribusi angkatan kerja antar sektor menjadi penentu penting dalam memahami arah dan kecepatan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian, pembahasan mengenai angkatan kerja tidak dapat dipisahkan dari transformasi struktural karena perubahan dalam pasar tenaga kerja merupakan inti dari modernisasi perekonomian.

2.2 Hubungan Antar variabel

2.2.1 Hubungan Investasi Terhadap Transformasi Struktural

Investasi merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan arah dan kecepatan transformasi struktural suatu perekonomian. Dalam teori pembangunan modern, investasi dipandang tidak hanya sebagai penambah kapasitas produksi, tetapi juga sebagai pendorong utama perubahan structural melalui peningkatan produktivitas, adopsi teknologi, serta perluasan sektor-sektor modern.

McMillan dan Rodrik (2011) menegaskan bahwa transformasi struktural terjadi ketika investasi diarahkan pada sektor-sektor berproduktivitas tinggi,

khususnya industri manufaktur dan jasa modern, sehingga menciptakan perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian yang berproduktivitas rendah. Perpindahan tenaga kerja inilah yang menjadi pusat mekanisme transformasi struktural, karena output dan produktivitas agregat meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi tenaga kerja di sektor modern.

Investasi yang mengalir ke sektor modern memungkinkan munculnya teknologi baru dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. Perubahan ini menghasilkan peningkatan produktivitas secara signifikan dan membuka peluang bagi perluasan kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi. Ketika kapasitas sektor modern meningkat, kebutuhan tenaga kerja juga ikut naik sehingga menciptakan insentif untuk menarik tenaga kerja dari sektor tradisional. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Chenery dan Syrquin (1975), yang menyatakan bahwa investasi merupakan pendorong utama diversifikasi produksi dan perubahan komposisi sektor ekonomi di negara berkembang. Dengan kata lain, investasi berfungsi sebagai motor penggerak yang mengarahkan struktur ekonomi dari sektor primer menuju sektor manufaktur dan jasa.

Provinsi Sulawesi Selatan, pola tersebut terlihat dari bagaimana investasi pada sektor-sektor strategis mampu mempercepat pergeseran struktur ekonomi. Investasi pada infrastruktur telah meningkatkan konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, dan memperluas akses pasar, sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi berkembangnya sektor modern. Investasi di sektor industri pengolahan juga berperan dalam meningkatkan nilai tambah komoditas primer daerah, memperkuat rantai pasok, serta mendorong munculnya kegiatan ekonomi baru yang berorientasi pasar domestik maupun ekspor. Tanpa dorongan investasi, transformasi struktural cenderung berjalan lambat karena sektor tradisional tetap mendominasi aktivitas ekonomi.

Selain investasi fisik, investasi pada modal manusia (human capital investment) juga memiliki peran signifikan dalam mempercepat transformasi struktural. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perbaikan kesehatan memungkinkan pekerja lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru di sektor modern. Teori modal manusia menegaskan bahwa produktivitas tenaga kerja sangat bergantung pada tingkat investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, investasi yang diarahkan pada sektor pendidikan dan kompetensi tenaga kerja akan mempercepat perpindahan tenaga kerja menuju sektor-sektor berproduktivitas tinggi. Transformasi struktural menjadi lebih cepat ketika tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mengurangi hambatan mobilitas dari sektor tradisional ke sektor modern.

Berbagai penelitian empiris memperkuat hubungan antara investasi dan transformasi struktural. Marouani et al. (2023) menemukan bahwa investasi memiliki pengaruh signifikan dalam mempercepat industrialisasi dan diversifikasi ekonomi di negara-negara berkembang. Hal ini menegaskan bahwa investasi merupakan determinan utama terjadinya perubahan struktural.

Baymul dan Sen (2020) juga menemukan bahwa investasi pada sektor manufaktur mampu menciptakan pertumbuhan inklusif, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja modern. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi memiliki efek ganda: mempercepat transformasi struktural dan sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dalam kerangka pembangunan regional, investasi yang dialokasikan secara merata ke berbagai wilayah dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru (growth poles). Hal ini sejalan dengan teori Perroux yang menyatakan

bahwa investasi besar pada sektor tertentu dapat menciptakan efek limpahan (spillover effects) ke sektor dan wilayah lain. Di Provinsi Sulawesi Selatan, investasi pada sektor transportasi, energi, dan industri pengolahan diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah hinterland dan rural, sehingga transformasi struktural tidak hanya terbatas pada kawasan perkotaan tetapi juga meluas ke wilayah pedesaan.

kualitas investasi perlu menjadi perhatian penting. Investasi yang terlalu terfokus pada sektor padat modal dapat menciptakan pertumbuhan tanpa perluasan lapangan kerja (jobless growth), sehingga proses transformasi struktural menjadi tidak inklusif. Di sisi lain, investasi yang diarahkan pada sektor padat karya dan teknologi menengah lebih sesuai bagi negara berkembang untuk memastikan bahwa tenaga kerja benar-benar terserap dalam proses transformasi. Selain itu, investasi publik dalam infrastruktur dasar menjadi prasyarat agar investasi swasta dapat tumbuh, karena tanpa dukungan infrastruktur, efisiensi produksi dan jaringan distribusi sulit untuk berkembang.

Dengan demikian, investasi memiliki hubungan yang kuat dan kompleks terhadap transformasi struktural. Investasi tidak hanya menambah kapasitas produksi, tetapi juga menentukan arah modernisasi sektor-sektor ekonomi, memperkuat infrastruktur pendukung, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja di sektor modern. Semakin tinggi dan semakin berkualitas investasi yang diterima suatu wilayah, semakin cepat proses transformasi struktural dapat berlangsung.

2.2.2 Hubungan Jumlah Penduduk dan Transformasi Struktural

Pertumbuhan penduduk berperan ganda dalam proses transformasi ekonomi. Menurut Chenery dan Syrquin (1975), populasi yang besar akan meningkatkan permintaan agregat domestik dan mendorong diversifikasi

konsumsi masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, pola konsumsi bergeser dari barang kebutuhan primer (pertanian) ke barang sekunder dan jasa. Pergeseran konsumsi inilah yang menjadi pemicu alokasi sumber daya produksi ke sektor industri dan jasa, sehingga mendorong transformasi structural.

Selain sebagai faktor permintaan, populasi juga berperan dalam sisi penawaran. Chenery (1979) menegaskan bahwa tenaga kerja dalam jumlah besar diperlukan untuk menopang pertumbuhan sektor modern. Negara-negara dengan pertumbuhan populasi tinggi cenderung memiliki cadangan tenaga kerja yang bisa dialihkan dari sektor pertanian ke sektor industry. Hal ini sesuai dengan teori dualism Lewis (1954), di mana pembangunan ditandai oleh perpindahan tenaga kerja dari pertanian subsisten ke sektor modern yang lebih produktif.

Namun, pertumbuhan penduduk tidak selalu memberikan dampak positif. Kuznets (1971) menyatakan bahwa tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, populasi yang besar hanya akan memperburuk ketimpangan dan menimbulkan beban pembangunan. Kelebihan tenaga kerja yang tidak terampil dapat menyebabkan terjadinya pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) di sektor pertanian maupun sektor informal perkotaan. Populasi yang besar menjadi hambatan, bukan pendorong, transformasi structural.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan justru mampu menjadi bonus demografi. Menurut Bloom & Williamson (1998), bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif meningkat, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi jika diiringi kebijakan yang tepat. Dalam kaitannya dengan transformasi struktural, bonus demografi mempercepat peralihan tenaga kerja ke sektor industri dan jasa berproduktivitas tinggi.

Di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, populasi besar seharusnya menjadi potensi ekonomi. Namun, jika tidak diimbangi dengan kebijakan peningkatan mutu sumber daya manusia, maka hal itu akan menciptakan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Urbanisasi berlebihan akibat pertumbuhan penduduk desa dapat menyebabkan sektor perkotaan informal membengkak. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Todaro (1980) yang menekankan bahwa urbanisasi tanpa penciptaan lapangan kerja di sektor modern hanya menghasilkan masalah baru berupa kemiskinan perkotaan (Todaro, M. P., 1980).

Dalam perspektif jangka panjang, populasi yang besar juga menciptakan kebutuhan pembangunan infrastruktur, perumahan, energi, dan layanan publik. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan struktural Chenery (1979) yang menekankan bahwa transformasi ekonomi tidak hanya membutuhkan pertumbuhan produksi, tetapi juga harus diiringi perubahan dalam struktur sosial, tenaga kerja, dan pelayanan publik. Dengan kata lain, populasi yang besar akan mempercepat transformasi hanya jika disertai pembangunan sosial yang memadai.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pertumbuhan penduduk memiliki peran ambivalen. Ia bisa menjadi motor penggerak transformasi struktural melalui pasar dan tenaga kerja, tetapi juga bisa menjadi hambatan jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengelolaan populasi melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan menjadi syarat utama agar bonus demografi benar-benar dapat mempercepat transformasi struktural di Sulawesi Selatan.

2.2.3 Hubungan Angkatan Kerja terhadap Transformasi Struktural

Tenaga kerja merupakan indikator paling nyata dari terjadinya transformasi struktural. Lewis (1954) dalam model dual-sektor menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi ditandai dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional berproduktivitas rendah (pertanian subsisten) ke sektor modern berproduktivitas tinggi (industri dan jasa). Pergeseran ini menghasilkan peningkatan produktivitas agregat, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan.

Pandangan ini diperkuat oleh Chenery (1979) yang menyatakan bahwa transformasi struktural tidak hanya dilihat dari perubahan kontribusi output sektoral, tetapi juga dari distribusi tenaga kerja antar sektor. Seiring meningkatnya pendapatan per kapita, tenaga kerja akan berpindah dari pertanian ke industri, kemudian ke sektor jasa. Pergeseran ini mencerminkan evolusi pembangunan jangka panjang di mana sektor modern menjadi penggerak utama pertumbuhan.

Pergeseran tenaga kerja tidak selalu berjalan linier. Menurut Timmer (2012), salah satu tantangan di negara berkembang adalah keterbatasan kualitas tenaga kerja. Banyak pekerja yang berpindah dari pertanian tidak masuk ke sektor formal modern, tetapi justru ke sektor informal perkotaan yang berproduktivitas rendah. Fenomena ini menyebabkan transformasi struktural yang “setengah jalan”, di mana pertumbuhan sektor modern terjadi, tetapi tidak cukup inklusif untuk menyerap tenaga kerja secara luas. Dalam kerangka pembangunan daerah, masalah serapan tenaga kerja menjadi sangat penting (Timmer, C. P. , 2012). Chenery & Syrquin (1975) menekankan bahwa transformasi struktural hanya berhasil jika tenaga kerja yang berpindah dari pertanian mampu mendapatkan pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi.

Apabila sektor industri dan jasa tidak berkembang cukup cepat, maka akan terjadi surplus tenaga kerja di perkotaan yang menekan upah dan memperburuk ketimpangan.

Dinamika tenaga kerja juga sangat dipengaruhi oleh investasi pada modal manusia. Menurut Becker (1993), akumulasi modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan meningkatkan kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan teknologi di sektor modern. Dengan demikian, investasi pada pendidikan menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi struktural melalui tenaga kerja (Becker, 1993). Pengalaman negara Asia Timur seperti Korea Selatan menunjukkan bahwa transformasi struktural yang berhasil selalu diiringi oleh peningkatan kualitas tenaga kerja. World Bank (1993) dalam laporannya tentang East Asian Miracle menyebutkan bahwa strategi investasi besar-besaran pada pendidikan dasar dan menengah menjadi kunci keberhasilan pergeseran tenaga kerja ke sektor industri berteknologi menengah dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak hanya berpindah antar sektor, tetapi juga mengalami peningkatan produktivitas.

Penelitian IJSRET (2024) yang dilakukan di Indonesia, pola-pola ini masih terbukti relevan. Sebagai contoh, penelitian *Dynamics of Structural Transformation and Employment* menggunakan data panel 2017–2022 di 34 provinsi Indonesia menemukan bahwa transformasi struktural memiliki efek positif terhadap perubahan penyerapan tenaga kerja, dengan pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (IJSRET, 2024). Selain itu, studi *Structural Transformation in the Indonesian Economy: Why Does 'Financial Development' Matter?* menyoroti bahwa transformasi pekerjaan (employment shift) lebih lambat dibandingkan perubahan struktur output yang menunjukkan bahwa hambatan kualitas tenaga kerja, infrastruktur, dan faktor institusional ikut

berperan. Kedua penelitian ini mendukung argumen klasik bahwa pergeseran tenaga kerja antar sektor adalah proses yang kompleks dan tidak otomatis (Wicaksono, D., & Arifin, M, 2023).

Di tingkat sektoral, penelitian *The Transformation of Economic Structure: Unlock The Labor* menambahkan bahwa kekuatan tenaga kerja sektor tertentu (elasticity tenaga kerja terhadap output antar sektor) memainkan peranan penting dalam transformasi struktural. Selain itu, kajian terbaru juga menunjukkan fenomena bahwa peningkatan efisiensi sektor industri tidak selalu diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang seimbang sebagian sektor manufaktur di Indonesia justru menunjukkan pola penyerapan tenaga kerja yang regresif dalam periode 2012–2020, meskipun efisiensinya meningkat (Ślusarczyk, B., & Czarnecka, M, 2024).

2.2.4 Hubungan Transformasi Struktural terhadap Ketimpangan Pendapatan

Transformasi struktural merupakan proses pembangunan jangka panjang yang ditandai dengan pergeseran kontribusi output dan tenaga kerja dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). Pergeseran ini, menurut Chenery (1979), merupakan inti dari pembangunan modern, karena mencerminkan meningkatnya produktivitas dan diversifikasi perekonomian. Namun, dampak dari transformasi struktural terhadap distribusi pendapatan tidak bersifat linier. Ia bisa bersifat positif (mengurangi ketimpangan) atau negatif (memperburuk ketimpangan), tergantung pada tahap pembangunan dan kualitas kebijakan yang diterapkan.

Secara teoretis, Kuznets (1955) menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi (hasil dari transformasi struktural) dengan ketimpangan pendapatan melalui kurva U terbalik (*inverted U-curve*). Pada tahap awal

industrialisasi, ketimpangan meningkat karena hanya sebagian kecil pekerja yang masuk ke sektor modern dengan upah lebih tinggi, sementara mayoritas masih tertinggal di sektor tradisional dengan pendapatan rendah. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak tenaga kerja yang terserap di sektor modern, upah meningkat, dan pemerataan pendapatan membaik. Dengan demikian, transformasi struktural pada tahap awal cenderung memperlebar ketimpangan, tetapi pada tahap lanjut berpotensi menurunkannya.

Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor modern adalah indikator utama transformasi struktural. Akan tetapi, jika sektor modern tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup, maka sebagian besar tenaga kerja akan tetap terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah. Kondisi ini tidak hanya memperlambat transformasi, tetapi juga memperlebar kesenjangan pendapatan antara pekerja sektor modern dan pekerja sektor tradisional. Dengan kata lain, keberhasilan transformasi dalam mengurangi ketimpangan sangat ditentukan oleh kapasitas sektor modern untuk menyerap tenaga kerja secara inklusif (Lewis, W. A., 1954).

Penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam. Baymul & Sen (2020) menemukan bahwa pergeseran ke sektor manufaktur cenderung menurunkan ketimpangan di negara berkembang karena industri manufaktur relatif padat karya. Sebaliknya, pergeseran ke sektor jasa modern yang padat modal dan teknologi justru berisiko meningkatkan ketimpangan, terutama bila akses tenaga kerja berpendidikan rendah terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa arah transformasi struktural apakah ke manufaktur atau jasa menjadi faktor penting dalam menentukan dampaknya terhadap distribusi pendapatan.

Studi lain di negara berkembang juga menegaskan pentingnya kualitas kebijakan publik. World Bank (1993) dalam laporan *The East Asian Miracle*

menunjukkan bahwa negara-negara Asia Timur berhasil menekan ketimpangan meskipun mengalami transformasi cepat. Temuan terbaru menunjukkan bahwa di banyak negara Afrika Sub-Sahara, transformasi struktural yang didorong terutama oleh sektor ekstraktif dan jasa perkotaan tidak mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang inklusif. Akibatnya, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena modernisasi ekonomi tidak diikuti oleh pergeseran tenaga kerja ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi (Ngwakwe, C. C., & Kamara, M. , 2024).

Provinsi Sulawesi Selatan, transformasi struktural tercermin dari menurunnya kontribusi sektor primer dan meningkatnya sektor jasa serta perdagangan. Namun, masih terdapat risiko ketimpangan jika pergeseran ini hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan tidak mampu menyerap tenaga kerja pedesaan secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Timmer (2012) yang menegaskan bahwa transformasi di negara berkembang sering kali “setengah jalan”, di mana pertumbuhan sektor modern terjadi tetapi tidak inklusif terhadap seluruh tenaga kerja.

Dengan demikian, hubungan antara transformasi struktural dan ketimpangan pendapatan bersifat dinamis. Pada tahap awal, transformasi cenderung memperlebar ketimpangan karena perbedaan produktivitas antar sektor. Namun, dalam jangka panjang, transformasi berpotensi mengurangi ketimpangan apabila sektor modern mampu menyerap tenaga kerja secara luas, pemerintah berinvestasi pada modal manusia, dan pertumbuhan sektor modern bersifat inklusif. Oleh karena itu, arah dan kualitas transformasi struktural akan sangat menentukan apakah pembangunan di Sulawesi Selatan mampu menekan atau justru memperburuk ketimpangan pendapatan.

2.3 Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan Dewi Sinta dalam Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan struktural dan bagaimana pengaruhnya terhadap disparitas pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 – 2021. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh transformasi struktural sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan analisis data panel dengan menggunakan model Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM) yang diolah dengan keseluruhan observasi sebesar 87 observasi. Serta digunakannya Uji Sobel untuk menganalisis variabel intervening.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dan PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perubahan struktural, pendapatan perkapita dan PMDN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perubahan struktural. Lalu, pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, tenaga kerja dan PMA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan, PMDN dan perubahan struktural berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan. (Dewi, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Sander dan Yoong (2020) dari World Bank berjudul “Structural Transformation and Labor Productivity in Indonesia: Where Are All the Good Jobs?” bertujuan untuk menganalisis hubungan antara transformasi struktural dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode dekomposisi produktivitas sektoral dengan memisahkan kontribusi *within-sector productivity growth* (peningkatan produktivitas di dalam sektor) dan *between-sector reallocation* (pergeseran tenaga kerja antar sektor). Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan mencakup

periode 2008–2018, dengan fokus pada tiga kelompok sektor utama, yaitu pertanian, industri, dan jasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja di Indonesia selama periode tersebut lebih banyak disebabkan oleh peningkatan produktivitas di dalam sektor (*within-sector growth*) daripada oleh pergeseran tenaga kerja antar sektor produktif. Dengan kata lain, transformasi struktural tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja antar sektor, karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia bersumber dari efisiensi internal dalam sektor-sektor tertentu, bukan dari migrasi tenaga kerja menuju sektor yang lebih produktif. Temuan ini menunjukkan adanya fenomena *jobless growth* di mana pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sektoral tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesempatan kerja.

Penelitian Kim, Sumner, dan Yusuf (2018) menggunakan data panel sektoral Indonesia 1990–2015 dengan metode dekomposisi produktivitas dan regresi panel dinamis (GMM) untuk menilai dampak transformasi struktural terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai tambah sektor modern terutama industri pengolahan dan jasa meningkat, pergeseran tenaga kerja tidak diikuti kenaikan produktivitas, sehingga pertumbuhan yang terjadi cenderung bersifat *jobless growth*. Sektor jasa yang tumbuh pesat sebagian besar berasal dari subsektor berproduktivitas rendah, sehingga kontribusinya terhadap kesejahteraan tenaga kerja masih terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi struktural di Indonesia tidak selalu menghasilkan peningkatan kesempatan kerja produktif, serta hubungan antara angkatan kerja dan perubahan struktur ekonomi dapat menjadi tidak signifikan ketika pertumbuhan lebih bersifat padat modal.

Penelitian Romli et al. (2016) berjudul *“Transformasi Struktural: Faktor-Faktor dan Pengaruhnya terhadap Disparitas Pendapatan di Madura”* menggunakan data panel (pooled data) empat kabupaten di Madura yang menggabungkan data time series 1998–2014 dengan data cross-section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi dan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap transformasi struktural, khususnya pada perubahan nilai tambah sektor pertanian dan industri. Pada sektor jasa, hanya populasi yang berpengaruh signifikan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pangsa sektor pertanian menurunkan disparitas pendapatan, sedangkan pangsa sektor industri dan jasa meningkatkan ketimpangan pendapatan di Madura.

Penelitian McMillan dan Rodrik (2011) berjudul *“Globalization, Structural Change and Productivity Growth”* menggunakan analisis dekomposisi produktivitas agregat dengan data panel dari 38 negara berkembang periode 1990–2005. Studi ini memisahkan pertumbuhan produktivitas menjadi komponen within-sector dan between-sector untuk menilai pengaruh transformasi struktural terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah perpindahan tenaga kerja sangat menentukan dampak transformasi struktural. Di Asia, perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke manufaktur berproduktivitas tinggi meningkatkan pertumbuhan nasional. Namun di Amerika Latin dan Afrika, tenaga kerja justru bergeser ke sektor jasa informal berproduktivitas rendah, sehingga memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan dan meningkatkan ketimpangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya mendorong perpindahan tenaga kerja ke sektor produktif agar transformasi struktural menghasilkan pertumbuhan yang inklusif.

Penelitian Putri dan Monika (2023) berjudul *“Perubahan Struktural dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Jawa Barat Periode 2011–2019”*

menggunakan metode regresi data panel random effect untuk menganalisis pengaruh perubahan sektoral terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor industri berpengaruh negatif dan signifikan, artinya perkembangan sektor ini mampu menurunkan ketimpangan karena industri dapat menyerap tenaga kerja secara lebih luas. Sebaliknya, sektor jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, karena pertumbuhannya didominasi oleh subsektor berproduktivitas rendah seperti jasa informal yang tidak memberikan efek pemerataan. Adapun sektor pertanian memiliki pengaruh negatif dan signifikan, menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja yang tinggi di sektor ini berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pendapatan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa arah transformasi struktural di Jawa Barat apakah menuju industri, jasa, atau pertanian sangat menentukan dinamika ketimpangan pendapatan regional.

